



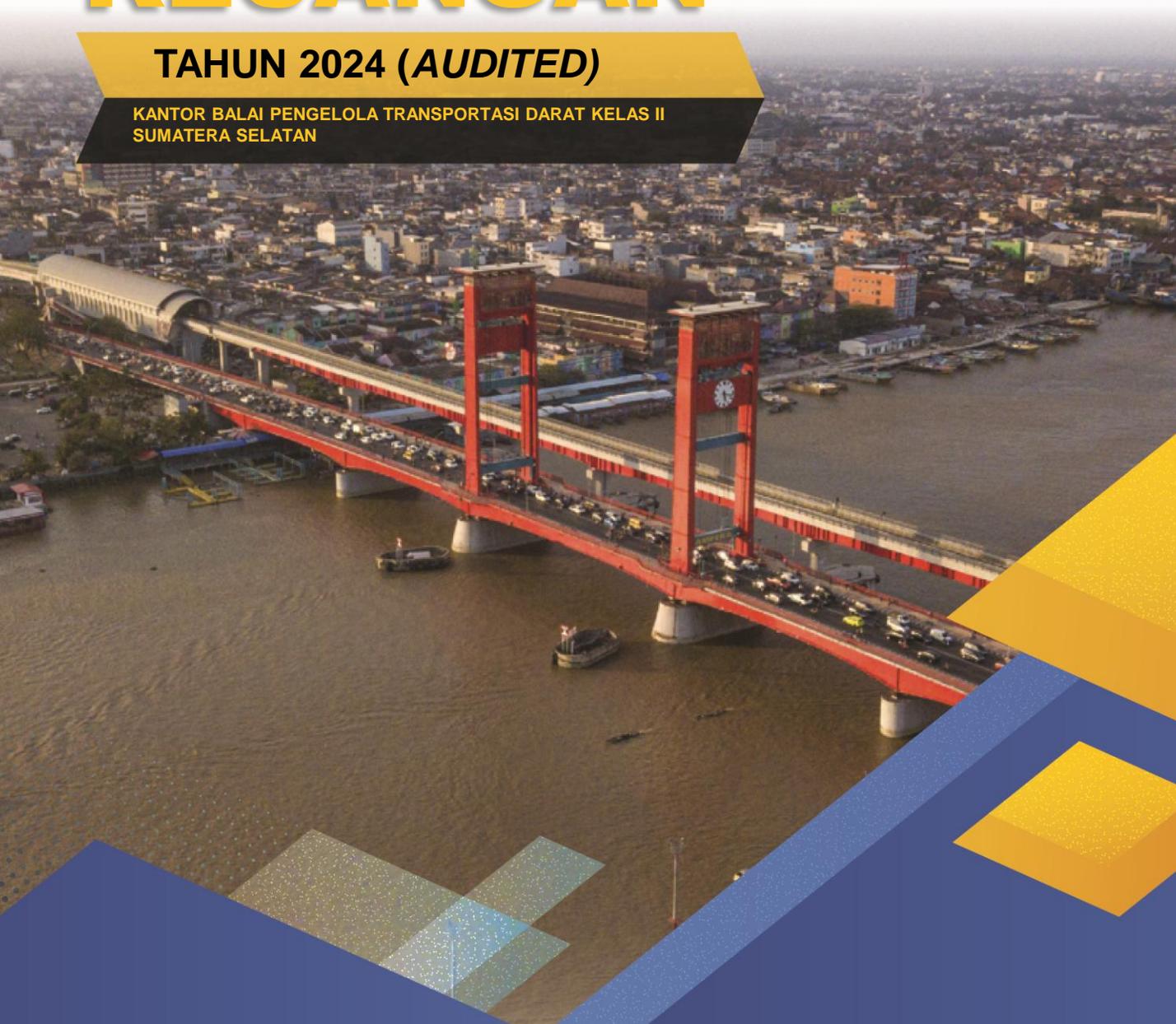
Kementerian Perhubungan  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

# LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024 (AUDITED)

KANTOR BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II  
SUMATERA SELATAN



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 31 Desember 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran.



Ditandatangani secara elektronik  
NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST, MT  
NIP. 19711116 199803 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	

## **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 31 Desember 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran.

ttd.

Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.  
NIP. 19711116 199803 1 002

Laporan Keuangan Semester II BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Per-31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 897,847,678 atau mencapai 477% dari target penerimaan sebesar Rp187.923.000.

Realisasi Belanja Negara pada Per-31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 170,727,467,895 atau mencapai 96,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp 176,090,836,000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per-31 Desember 2024. Nilai Aset Per-31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 428,758,600,062 terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 32,165,982,846; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 366.920.053.238; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 29.672.563.978. Nilai Kewajiban dan Nilai Ekuitas masing-masing sebesar Rp 6,381,073,231 dan Rp 422,377,526,831.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Per-31 Desember 2024 adalah sebesar Rp564.357.110; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp211.989.382.597; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp211.425.025.487). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp5.345.285.432) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp216.770.310.919)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp448.973.500.549 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp216.770.310.919) dan ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp4.985.957.111 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp185.188.380.090 sehingga Ekuitas entitas Per- 31 Desember 2024 adalah senilai Rp422.377.526.831.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Per-31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Per-31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA. 2024			TA. 2023
		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%REALISASI ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		187,923,000	897,847,678	477.77	865,282,585
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>187,923,000</b>	<b>897,847,678</b>	<b>477.77</b>	<b>865,282,585</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai		29,187,711,000	29,161,665,363	99.91	24,296,835,725
Belanja Barang		59,086,798,000	56,017,750,419	94.81	98,631,687,507
Belanja Modal		87,816,327,000	85,548,052,113	97.42	54,687,540,142
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>176,090,836,000</b>	<b>170,727,467,895</b>	<b>96.95</b>	<b>177,616,063,374</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**II. NERACA**

**BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Persediaan		32,165,982,846	130,819,606,666
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>32,165,982,846</b>	<b>130,819,606,666</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		35,882,284,651	35,860,048,651
Peralatan dan Mesin		203,186,193,214	211,369,835,922
Gedung dan Bangunan		99,042,733,837	90,599,236,469
Jalan, Irigasi dan Jaringan		118,712,099,454	111,390,244,454
Aset Tetap Lainnya		13,060,000	13,060,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		67,798,767,609	297,546,600
AKUMULASI PENYUSUTAN		(157,715,085,527)	(137,669,792,763)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>366,920,053,238</b>	<b>311,860,179,333</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud		954,878,200	6,306,083,300
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		9,529,739,778	2,509,561,477
Aset Lain-lain		25,583,928,000	
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA		-6,395,982,000	(74,868,750)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>29,672,563,978</b>	<b>8,740,776,027</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>428,758,600,062</b>	<b>451,420,562,026</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga		6,381,073,231	2,447,061,477
Utang Yang Belum Ditagihkan			
Uang Muka dari KPPN			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>6,381,073,231</b>	<b>2,447,061,477</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>6,381,073,231</b>	<b>2,447,061,477</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas		422,377,526,831	448,973,500,549
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>422,377,526,831</b>	<b>448,973,500,549</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>428,758,600,062</b>	<b>451,420,562,026</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		564,357,110	545,711,545
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>		<b>564,357,110</b>	<b>545,711,545</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>564,357,110</b>	<b>545,711,545</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai		29,161,665,363	24,296,835,725
Beban Persediaan		770,872,143	1,273,437,652
Beban Barang dan Jasa		46,036,665,831	50,315,854,089
Beban Pemeliharaan		3,587,308,159	6,263,107,871
Beban Perjalanan Dinas		5,825,062,279	5,865,216,264
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		101,113,922,827	65,995,548,410
Beban Penyusutan dan Amortisasi		25,493,885,995	29,954,002,747
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>211,989,382,597</b>	<b>183,964,002,758</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(211,425,025,487)</b>	<b>(183,418,291,213)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		<b>(5,678,776,000)</b>	<b>(33,154,843,000)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		5,678,776,000	(33,154,843,000)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		<b>333,490,568</b>	<b>(61,420,253,394)</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		333,490,568	319,571,040
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		333,490,568	61,739,824,434
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(5,345,285,432)</b>	<b>(94,575,096,394)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(216,770,310,919)</b>	<b>(277,993,387,607)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(216,770,310,919)</b>	<b>(277,993,387,607)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>		<b>448,973,500,549</b>	<b>568,659,528,198</b>
SURPLUS/DEFISIT-LO		(216,770,310,919)	(277,993,387,607)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		4,985,957,111	77,775,708,131
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		2,599,157,000	(16,225,497,394)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		2,386,800,111	94,001,205,525
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		185,188,380,090	62,531,651,827
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(26,595,973,718)</b>	<b>(132,686,027,649)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>422,377,526,831</b>	<b>448,973,500,549</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

*Dasar Hukum*  
*Entitas dan*  
*Rencana*  
*Strategis*

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat berkedudukan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Sumatera Selatan, 30961.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Akuntansi Istimewa Palembang berkomitmen dengan visi “**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien. akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga

dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Triwulan III ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Istimewa Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa,
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal hingga DIPA Revisi ke-13. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	187,923,000	187,923,000
<b>Jumlah</b>	<b>187,923,000</b>	<b>187,923,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	22,104,607,000	29,187,711,000
Belanja Barang	57,002,795,000	59,086,798,000
Belanja Modal	88,031,724,000	87,816,327,000
<b>Jumlah</b>	<b>167,139,126,000</b>	<b>176,090,836,000</b>

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp897,847,678*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp897,847,678. Pendapatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdiri dari Penerimaan negara bukan pajak dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

URAIAN	2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	187,923,000	897,847,678	478
<b>JUMLAH</b>	<b>187,923,000</b>	<b>897,847,678</b>	<b>478</b>

*Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA.2024*

URAIAN	2024		
	TARGET	REALISASI	%REALISASI ANGGARAN
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,500,000	60,249,340	
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	105,000,000	128,000,000	
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	28,073,000	211,522,770	
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	52,350,000	162,830,000	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,755,000	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	159	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	333,490,409	
<b>JUMLAH</b>	<b>187,923,000</b>	<b>897,847,678</b>	<b>477.77</b>

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	897,847,678	865,282,585	1.85
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>897,847,678</b>	<b>865,282,585</b>	<b>1.85</b>

Pendapatan PNBPN pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang merupakan pendapatan dari sewa kios Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar, sewa tanah di Terminal Tipe A Batu Kuning dan Pendapatan di Bidang Jasa yaitu Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Sandar Dermaga II Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pengembalian Belanja Barang dan Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan.

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp170,727,467,895*

## **B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 170,727,467,895 atau 96.95 % dari anggaran belanja sebesar Rp 176,090,836,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024*

URAIAN	2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Belanja Pegawai	29,187,711,000	29,161,665,363	99.91
Belanja Barang	59,086,798,000	56,017,750,419	94.81
Belanja Modal	87,816,327,000	85,548,052,113	97.42
<b>JUMLAH</b>	<b>176,090,836,000</b>	<b>170,727,467,895</b>	<b>96.95</b>

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 1,98% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 disebabkan karena alokasi anggaran pada Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan Tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar Rp170,727,467,895 dan Rp177,616,063,374.

### *Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	29,161,665,363	24,296,835,725	9.10
Belanja Barang	56,017,750,419	98,631,687,507	(27.56)
Belanja Modal	85,548,052,113	54,687,540,142	22.01
<b>JUMLAH</b>	<b>170,727,467,895</b>	<b>177,616,063,374</b>	<b>(1.98)</b>

*Belanja Pegawai  
Rp29,161,665,363*

## **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29,161,665,363 dan Rp24,296,835,725. Belanja Pegawai pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan yaitu gaji dan tunjangan sudah di kelola secara mandiri oleh BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Realisasi belanja Tahun Anggaran

2024 mengalami kenaikan sebesar 9,10% dari Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya Kenaikan Gaji ASN Tahun 2024 sesuai PP 1 Tahun 2024 dan Penambahan CPNS sebanyak 31 Orang TMT 01 Oktober 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	14,433,395,728	12,354,610,157	7.76
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	199,262,000	40,884,764	65.95
Belanja Lembur PNS dan PPPK	764,483,000		100.00
Belanja Lembur PNS		556,088,000	100.00
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	13,774,612,941	11,345,260,103	9.67
Jumlah Belanja Bruto	29,171,753,669	24,296,843,024	9.12
Pengembalian Belanja	10,088,306	7,299	99.86
<b>JUMLAH</b>	<b>29,161,665,363</b>	<b>24,296,835,725</b>	<b>9.10</b>

**B.4 Belanja Barang**

*Belanja Barang  
Rp56,017,750,419*

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp56,017,750,419 dan Rp 98,691,917,107. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (27,58)% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena berdasarkan PM 6 Tahun 2023 BPTD Wilayah VII Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dipecah menjadi BPTD Kelas II Sumatera Selatan dan BPTD Kelas III Bangka Belitung. Sehingga, anggaran belanja barang dipecah untuk 2 Balai Pengelola Transportasi Darat.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	16,808,157,155	28,444,415,515	(25.71)
Belanja Barang Non Operasional	26,732,341,362	18,792,292,044	17.44
Belanja Barang Persediaan	632,014,150	473,016,900	14.39
Belanja Jasa	2,496,370,814	3,070,434,829	(10.31)
Belanja Pemeliharaan	3,523,804,659	7,078,586,726	(33.53)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,825,062,279	5,865,216,264	(0.34)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	34,967,954,829	(100.00)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>56,017,750,419</b>	<b>98,691,917,107</b>	<b>(27.58)</b>

*Belanja Modal*

*Rp85,548,052,113*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp85,548,052,113 dan Rp54,718,547,642. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp42,232,327,392 dari Tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,638,768,657	26,698,551,738	(29.17)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,252,323,296	28,019,995,904	42.97
Belanja Modal Lainnya	656,960,160	-	100.00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>85,548,052,113</b>	<b>54,718,547,642</b>	<b>21.98</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Tahun Anggaran 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah  
TA. 2024 dan TA. 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp14,638,768,657*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14,638,768,657 dan Rp26,698,551,738. Pada Tahun 2024 belanja modal peralatan dan mesin pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar (29,17)% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja modal peralatan mesin Tahun 2024 berkurang sebesar Rp 12,059,783,081 dari Tahun Anggaran 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal PM  
TA. 2024 dan TA. 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,638,768,657	26,698,551,738	(29.17)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14,638,768,657</b>	<b>26,698,551,738</b>	<b>(29.17)</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp70,252,323,296*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp70,252,323,296 dan Rp28,019,995,904.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,252,323,296	28,019,995,904	42.97
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>70,252,323,296</b>	<b>28,019,995,904</b>	<b>42.97</b>

*Belanja Modal  
Lainnya  
Rp 656,960,160*

### **B.5.4 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 656,960,160 dan Rp0. Pada Tahun 2024 terdapat Belanja Modal Lainnya berupa Penyusunan Dokumen Kegiatan Pembangunan di BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

*Belanja Modal  
Jalan. Irigasi dan  
JaringanRp0*

### **B.5.5 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

### **B.5.6 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0.

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2024 dan TA. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2023	%NAIK (TURUN)
BPG14 BPTD	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	-	-	-

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Piutang PNBP  
Rp0*

### C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP periode TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih-Piutang  
Bukan Pajak  
Rp0*

### C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR*

*Rp0*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Bagian Lancar TPA*

*Rp0*

### **C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – Piutang  
Lancar  
Rp0*

### **C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Belanja Dibayar di  
Muka Rp0*

### **C.9 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0*

### **C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Persediaan  
Rp 32,165,982,846*

### **C.11 Persediaan**

Nilai Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 32,165,982,846 dan Rp 130,819,606,666 mengalami penurunan sebesar (60,53)% dibandingkan pada Tahun 2023 dikarenakan alokasi anggaran Belanja Barang Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yaitu berupa Peningkatan Pelabuhan

Sungai 7 Ulu Kota Palembang (Program Quick Wins) Tahun 2021 - 2023 (Termasuk Supervisi), APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 008 Meranjat - Bts. Kota Kayu Agung (Kab. OI) TA. 2023, APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 009-010 Bts. Kota Kayu Agung - Sp. Penyandingan - Bts. Prov. Lampung (Kab.OKI) TA. 2023, APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 004 Betung - Bts. Kota Palembang TA. 2023, APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 032 Bts. Kota Sekayu - Betung (Kab. Muba) TA. 2023, APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 039 Bts. Kota Palembang/Bts. Kab. Banyuasin - Tj. Api-Api TA. 2023, LRK APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 001 Peninggalan - Bts. Prov. Jambi (Kab. Muba), Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan APJ Konvensional (Kab. Musi Banyuasin) TA. 2023, Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan APJ Konvensional (Ruas Jalan Kab. Desa Limau, Sembawa) TA. 2023, Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Solar Cell) Tahun 2023, Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. OKI, Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. Musi Banyuasin, Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. OKI, Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. Musi Banyuasin, DED Peningkatan Prasarana Pelabuhan Sungai 7 Ulu Kota Palembang, 17. Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Sungai 7 Ulu Kota Palembang Tahun 2022.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun

Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023*

JENIS	REALISASI ANGGARAN TA.2024	REALISASI ANGGARAN TA.2023	%NAIK (TURUN)
Barang Konsumsi	45,734,674	184,592,667	(60.29)
Tanah Bangunan untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat	22,479,990,072	97,620,014,400	(62.56)
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9,640,258,100	32,071,507,599	(53.78)
Jalan, Irigasi, Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	943,492,000	-
<b>JUMLAH</b>	<b>32,165,982,846</b>	<b>130,819,606,666</b>	<b>(60.53)</b>

*Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2024*

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Barang Konsumsi	184,592,667	631,755,350	770,613,343	45,734,674
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0		0
Tanah Bangunan untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat	97,620,014,400	0	75,140,024,328	22,479,990,072
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	32,071,507,599	2,599,157,000	25,030,406,499	9,640,258,100
Jalan, Irigasi, Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	943,492,000	0	943,492,000	0
Bahan Baku	0	318,800	318,800	0
Persediaan lainnya	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>130,819,606,666</b>	<b>3,231,231,150</b>	<b>101,884,854,970</b>	<b>32,165,982,846</b>

*Rincian Mutasi Kurang Persediaan Tahun 2024*

No	Nama Kegiatan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Peningkatan Pelabuhan Sungai 7 Ulu Kota Palembang (Program Quick Wins) Tahun 2021 - 2023 (Termasuk Supervisi)	75,140,024,328	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
2	APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 008 Meranjat - Bts. Kota Kayu Agung (Kab. OI) TA. 2023	2,198,666,333	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
3	APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 009-010 Bts. Kota Kayu Agung - Sp. Penyandingan - Bts. Prov. Lampung (Kab.OKI) TA. 2023	4,913,966,333	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
4	APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 004 Betung - Bts. Kota Palembang TA. 2023	2,741,726,333	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
5	APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 032 Bts. Kota Sekayu - Betung (Kab. Muba) TA. 2023	1,750,204,500	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
6	APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 039 Bts. Kota Palembang/Bts. Kab. Banyuasin - Tj. Api-Api TA. 2023	3,297,925,500	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
7	LRK APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 001 Peninggalan - Bts. Prov. Jambi (Kab. Muba)	310,961,500	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
8	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan APJ Konvensional (Kab. Musi Banyuasin) TA. 2023	928,453,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
9	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan APJ Konvensional (Ruas Jalan Kab. Desa Limau, Sembawa) TA. 2023	901,330,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
10	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Pengadaan Dan Pemasangan Alat	5,388,016,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah

	Penerangan Jalan Solar Cell) Tahun 2023		
11	Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. OKI	1,689,000,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
12	Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. Musi Banyuasin	791,000,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
13	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. OKI	59,573,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
14	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell di Kab. Musi Banyuasin	59,584,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
15	DED Peningkatan Prasarana Pelabuhan Sungai 7 Ulu Kota Palembang	543,004,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
16	Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Sungai 7 Ulu Kota Palembang Tahun 2022	400,488,000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA. 2024 dan TA. 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.13 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – PJP  
Rp0*

### **C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

## Tanah

Rp35.882.284.651

### C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar Rp35.882.284.651 dan Rp35.860.048.651.

## Peralatan dan Mesin

Rp203.186.193.214

### C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA. 2024 dan TA. 2023 adalah Rp203.186.193.214 dan Rp211.369.835.922. Terdapat kenaikan pada saldo aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan terdapat reklasifikasi aset berupa alat angkutan apung bermotor.

#### Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Peralatan dan Mesin	211,369,835,922	17,400,285,292	25.583.928.000	203,186,193,214
<b>JUMLAH</b>	<b>211,369,835,922</b>	<b>17,400,285,292</b>	<b>25.583.928.000</b>	<b>203,186,193,214</b>

## Gedung dan

## Bangunan

Rp99.042.733.837

### C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah Rp99.042.733.837 dan Rp90.599.235.469. Terdapat aset yang di Transfer Masuk dari Seditjen Hubdat dan Reklasifikasi dari Rehabilitasi Terminal Tipe A Simpang Periuik.

#### Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Gedung dan Bangunan	90,599,236,469	8,443,497,368	-	99,042,733,837
<b>JUMLAH</b>	<b>90,599,236,469</b>	<b>8,443,497,368</b>	<b>-</b>	<b>99,042,733,837</b>

*Jalan, Jaringan dan  
Irigasi  
Rp118.712.099.454*

### **C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2024 dan TA. 2023 sebesar Rp118.712.099.454 dan Rp111.390.244.454. Terdapat Transfer Masuk dari Seditjen Hubdat.

*Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024*

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111,390,244,454	7,321,855,000	-	118,712,099,454
<b>JUMLAH</b>	<b>111,390,244,454</b>	<b>7,321,855,000</b>	<b>-</b>	<b>118,712,099,454</b>

*BMN dalam Proses  
PMPP  
Rp482.420.299.156*

### **C.19 BMN dalam Proses PMPP**

Saldo BMN dalam Proses PMPP TA. 2024 482.420.299.156. Pada periode 14 tahun anggaran 2024, dilakukan penyesuaian pencatatan terhadap salah satu aset milik Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumatera Selatan, yaitu Kapal Motor Penumpang (KMP) Puteri Leanpuri. Aset ini sebelumnya tercatat dalam kelompok Peralatan dan Mesin, namun berdasarkan kondisi dan status terkini, KMP. Puteri Leanpuri merupakan bagian dari program Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) dan belum diserahterimakan sepenuhnya untuk digunakan sebagai aset operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan reklasifikasi atas aset dimaksud ke dalam kelompok BMN dalam Proses PMPP. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan status aktual barang sebagai bagian dari investasi pemerintah pusat yang masih dalam proses penyelesaian administrasi

*Rincian BMN dalam Proses PMPP Tahun 2024*

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
BMN dalam Proses PMPP	449,232,425,496	58,771,801,660	25.583.928.000	482,420,299,156
<b>JUMLAH</b>	<b>449,232,425,496</b>	<b>58,771,801,660</b>	<b>25.583.928.000</b>	<b>482,420,299,156</b>

## **C.20 Aset Tetap Lainnya**

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp13.060.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya TA. 2024 dan TA. 2023 adalah Rp13.060.000 dan Rp13.060.000.

*Konstruksi Dalam*  
*Pengerjaan*

*Rp67.798.767.609*

## **C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp67.798.767.609 dan Rp297.546.600. Terdapat pengadaan dan pemasangan *Local Port System* di Pelabuhan Tanjung Api-Api – Tanjung Kalian, Pembangunan Pelabuhan Sungai Upang dan Sungai Salek, Rehabilitasi Pelabuhan Karang Baru dan Sungai Lumpur, dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Tahun 2024.

*Akumulasi*  
*Penyusutan Aset*  
*Tetap*  
*Rp164.111.067.527*

## **C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset TA. 2024 dan TA. 2023 adalah (Rp164.111.067.527) dan (Rp137.669.792.763). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA.2024*

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	35,882,284,651	-	35,882,284,651
2	Peralatan Mesin	228,770,121,214	(143,127,288,722)	85,642,832,492
3	Gedung dan Bangunan	99,042,733,837	(15,353,054,723)	83,689,679,114
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	118,712,099,454	(5,630,724,082)	113,081,375,372
5	Aset Tetap Lainnya	13,060,000	-	13,060,000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>482,420,299,156</b>	<b>(164,111,067,527)</b>	<b>318,309,231,629</b>

*Aset Tak Berwujud  
Rp954.878.200*

### **C.23 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp954.878.200 dan Rp6.306.083.300.

*Dana yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp9.529.739.778*

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya TA. 2024 dan TA.2023 adalah Rp9.529.739.778 dan Rp2.509.561.477. dana yang dibatasi penggunaannya untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan diakhir tahun anggaran dengan mekanisme SPM Penampungan (RPATA).

*Rincian Pekerjaan dengan Mekanisme RPATA*

No	Nama Pekerjaan	Nilai
1	Layanan Keperintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	239,764,722
2	Pengawasan dan Verifikasi Pembayaran Biaya Layanan Keperintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	24,975,000
3	Jasa Kebersihan Excellent Service Pada Terminal Penumpang Tipe A Alang - Alang Lebar, Gedung Comand Center, Dan Gedung Kantor Bptd Kelas li Sumatera Selatan	51,000,000
4	Jasa Keamanan Excellent Service Pada Terminal Penumpang Tipe A Alang - Alang Lebar, Gedung Comand Center, Dan Gedung Kantor Bptd Kelas li Sumatera Selatan	35,700,000

5	Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Salek (Tahap I)	128,872,651
6	Konstruksi Pembangunan Dermaga Sungai Salek (Tahap 1)	1,285,160,675
7	Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Lumpur	1,569,445,917
8	Supervisi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Karang Baru	209,246,095
9	Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Karang Baru	4,831,543,808
10	Docking Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal Negara	661,731,000
11	Pengadaan Sarana Monitoring Kegiatan Layanan Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan	492,300,000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>9,529,739,778</b>

*Aset Lain-Lain Rp0*

#### **C.24 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya (Rp0)*

#### **C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar (Rp0) dan (Rp74.868.750).

*Uang Muka dari KPPN  
Rp240.000.000*

#### **C.26 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN TA. 2024 dan TA. 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp109.271.556*

### **C.27 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA. 2024 dan TA. 2023 masing-masing sebesar Rp6.381.073.231 dan Rp2.447.061.477. Utang kepada Pihak Ketiga yang muncul pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan adanya Penyelesaian Pekerjaan di akhir tahun anggaran yang pembayarannya menggunakan mekanisme RPATA.

#### *Rincian Pekerjaan dengan Mekanisme RPATA*

No	Nama Pekerjaan	Nilai
1	Layanan Keperintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	239,764,722
2	Pengawasan dan Verifikasi Pembayaran Biaya Layanan Keperintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	24,975,000
3	Jasa Kebersihan Excellent Service Pada Terminal Penumpang Tipe A Alang - Alang Lebar, Gedung Comand Center, Dan Gedung Kantor Bptd Kelas II Sumatera Selatan	51,000,000
4	Jasa Keamanan Excellent Service Pada Terminal Penumpang Tipe A Alang - Alang Lebar, Gedung Comand Center, Dan Gedung Kantor Bptd Kelas II Sumatera Selatan	35,700,000
5	Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Salek (Tahap I)	128,872,651
6	Konstruksi Pembangunan Dermaga Sungai Salek (Tahap 1)	1,285,160,675
7	Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Lumpur	621.500.583
8	Supervisi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Karang Baru	209,246,095
9	Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Karang Baru	2,630,822,595
10	Docking Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal Negara	661,731,000
11	Pengadaan Sarana Monitoring Kegiatan Layanan Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan	492,300,000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>6,381,073,231</b>

Pada Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Lumpur dan Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Karang Baru terdapat pemberian kesempatan pekerjaan. Sehingga pekerjaan telah selesai dan BAST pada tanggal 20 Januari 2025 dan 21 Januari 2025.

*Utang yang Belum  
Ditagihkan  
Rp0*

### **C.28 Utang yang Belum ditagihkan**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar Rp0*

### **C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar TA. 2024 dan TA. 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Ekuitas  
Rp422,377,526,831*

### **C.30 Ekuitas**

Ekuitas TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp422,377,526,831 dan Rp448,973,500,549. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

*Pendapatan PNBPNP*  
*Rp564,357,110*

Jumlah Pendapatan untuk TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar Rp564,357,110 dan Rp545,711,545

*Beban Pegawai*  
*Rp 29,161,665,363*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29,161,665,363 dan Rp 24,296,835,725.

*Beban Persediaan*  
*Rp770,872,143*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 770,872,143 dan Rp 1,273,437,652. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan Jasa*  
*Rp46,036,665,831*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46,036,665,831 dan Rp50,315,854,089. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TAHUN 20234	TAHUN 2023	%NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	7,860,486,033	13,792,571,947	-27.40
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	799,976,088	1,830,701,000	-39.18
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	391,000	9,210,500	-91.86
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	323,314,000	644,208,000	-33.17
Beban Barang Operasional Lainnya	7,823,990,034	12,167,724,068	-21.73
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	54,801,000	130,195,475	-40.75
Beban Honor Output Kegiatan	7,047,373,000	601,019,000	84.28
Beban Barang Non Operasional Lainnya	19,630,167,362	18,056,909,569	4.17
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,567,920,314	1,512,774,829	1.79
Beban Sewa	920,647,000	1,540,560,000	-25.19
Beban Jasa Profesi	6,800,000	17,100,000	-43.10
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	800,000	12,879,701	-88.30
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>46,036,665,831</b>	<b>50,315,854,089</b>	<b>(4.44)</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp3,587,308,159*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,587,308,159 dan Rp6,263,107,871. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,530,100,332	2,832,845,657	-29.86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,433,310,533	3,167,733,990	-37.70
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	238,928,328	232,515,404	1.36
Beban Pemeliharaan Lainnya	384,968,966	-	100.00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	7,745,000	-100.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		22,267,820	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3,587,308,159</b>	<b>6,263,107,871</b>	<b>(27.16)</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp5,825,062,279*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,825,062,279 dan Rp5,865,216,264. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2023	%NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	5,740,022,279.	5,549,786,264.	1.69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		22,400,000.	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	85,040,000.	293,030,000.	-55.01
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,825,062,279</b>	<b>5,865,216,264</b>	<b>(0.34)</b>

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp101,113,922,827*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp101,113,922,827 dan Rp65.995.548.410.

*Beban Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp25,493,885,995*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25,493,885,995 dan Rp29,954,002,747. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2024 dan 2023*

<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2024</b>	<b>TAHUN 2023</b>	<b>%NAIK (TURUN)</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21,181,300,321	26,436,983,898	-11.04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,965,354,101	1,649,702,872	8.73
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,248,622,024	1,741,346,754	12.71
Beban Penyusutan Irigasi	362,500	2,765,924	-76.83
Beban Penyusutan Jaringan	73,290,799	73,290,799	-
Beban Amortisasi Software	24,956,250	49,912,500	-33.33
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25,493,885,995</b>	<b>29,954,002,747</b>	<b>(8.04)</b>

## D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp333,490,568*

## D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023:*

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%NAIK (TURUN)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	333,490,568	319,571,040	2
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	61,739,824,434	-100
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>333,490,568</b>	<b>-61,420,253,394</b>	<b>-101</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

*Pos Luar Biasa Rp0*

## D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp448,973,500,549*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp448,973,500,549. dan Rp586,659,528,198.

### *Surplus (Defisit) LO*

*(Rp216,770,310,919)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp216,770,310,919) dan (Rp277,993,387,607). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian Nilai*

*Aset*

*Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp*

*Rp2,599,157,000*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,599,157,000 dan (Rp16,225,497,394).

### *Koreksi Atas*

*Reklasifikasi*

*Rp0*

### **E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp0*

### **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
Rp2,386,800,111*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2,386,800,111 dan Rp94,001,205,525.

*Koreksi Lain-Lain  
Rp0*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp185,188,380,090*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp185,188,380,090 dan Rp62,531,651,827. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	170,727,467,895	177,616,063,374
Diterima dari Entitas Lain	- 897,847,678	- 865,282,585
Transfer Keluar	-	- 115,205,626,461
Transfer Masuk	15,358,759,873	986,497,499
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>185,188,380,090</b>	<b>62,531,651,827</b>

*Diterima dari Entitas  
Lain (DDEL)/Ditagihkan  
ke Entitas Lain*

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024. DDEL sebesar (Rp897,847,678) sedangkan DKEL sebesar (Rp865,282,585).

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2024. Transfer Masuk sebesar Rp15,358,759,873 dan Transfer Keluar sebesar Rp0.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

*Ekuitas Akhir  
Rp422,377,526,831*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp422,377,526,831 dan Rp448,973,500,549.

**A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH  
TANGGAL NERACA**

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

-